



UTILIZATION OF QRIS BY MSMEs AS A CASHLESS SYSTEM IN THE DIGITAL ERA IN TLOGOMAS MALANG CITY, INDONESIA (Pemanfaatan QRIS oleh UMKM Sebagai Sistem Nirtunai di Era Digital di Tlogomas Kota Malang, Indonesia)

Oleh

Eddy Chandra¹, Friyanto², Djoewita³

¹Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Malang, Indonesia

^{2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Kota Malang, Indonesia

E-mail: ¹edychandra219@gmail.com, ²fri.friyanto@gmail.com,

³djoewita@stieimlg.ac.id

Article History:

Received: 23-09-2025

Revised: 15-10-2025

Accepted: 26-10-2025

Keywords:

QRIS, Cashless,
Digitalisasi

Abstract: *The integration of the Indonesian Standard Quick Response Code (QRIS) is a crucial strategic step for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) to modernize their payment infrastructure, thereby catalyzing the acceleration of the digital economy amid widespread digital transformation. This standardized payment system represents a foundational technological breakthrough, establishing a universal framework for QR-based non-cash transactions. Crucially, MSMEs are empowered to consolidate various payment platforms—spanning digital wallets, electronic money applications, and mobile banking services—under one unified QRIS logo. This eliminates the necessity for enterprises to manage multiple proprietary codes. The widespread implementation of QRIS furnishes smaller enterprises with a streamlined, highly effective mechanism to successfully transition towards a cashless operational model, significantly enhancing the fluidity and overall efficiency of financial exchanges. An analysis derived from a targeted investigation conducted in the Tlogomas area of Malang City, Indonesia, indicates that the assimilation of QRIS yields varied outcomes for local MSMEs. The findings underscore the system's inherent capacity to boost operational productivity and open up new market avenues, provided it is complemented by robust technological infrastructure and greater entrepreneurial literacy regarding its full scope of advantages. These observations necessitate proactive policy intervention aimed at heightening MSME proficiency and participation in the utilization of QRIS. It is incumbent upon governing bodies and associated entities to escalate outreach efforts and conduct extensive informational campaigns detailing QRIS benefits. Furthermore, targeted capacity building programs are essential to ensure MSME proprietors possess comprehensive technical mastery, enabling them to optimally leverage this digital payment technology not just for transactional expediency, but as a robust driver for business continuity and long-term sustainable expansion.*

PENDAHULUAN

Inovasi mutakhir dalam ranah teknologi digital telah menjadi motor penggerak dalam perancangan infrastruktur pembayaran yang unggul, menawarkan peningkatan signifikan dalam aspek efisiensi dan jaminan keamanan. Hal ini terwujud melalui solusi seperti dompet digital berbasis aplikasi seluler yang mengimplementasikan protokol keamanan terkini serta menjamin interoperabilitas yang mulus antarberbagai jenis platform transaksi elektronik. Penggunaan dana non-tunai secara luas dianggap unggul dalam mengoptimalkan efektivitas pembayaran, menjadikannya sebagai katalis penting yang mendorong kemakmuran ekonomi saat ini. Pertumbuhan ini pada dasarnya didukung oleh kapasitas sistem untuk menyediakan kemudahan akses yang lebih efisien, memfasilitasi pemrosesan transaksi yang jauh lebih cepat, dan menghasilkan manfaat positif yang substansial bagi perluasan dan pengembangan sektor usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara keseluruhan.

Contoh nyata dari standarisasi sistem terpadu ini adalah QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Sebagai akibatnya, masyarakat kini semakin terbiasa dengan model transaksi yang meniadakan penggunaan mata uang fisik, sebuah perubahan gaya hidup yang secara formal diakui sebagai Gerakan non tunai (Situmorang, 2021). Konsep Masyarakat "*Cashless Society*" mendefinisikan masyarakat yang telah beralih dari penggunaan uang kertas fisik untuk transaksi keuangan, dan kini sepenuhnya bergantung pada instrumen pembayaran digital, yang paling umum diwujudkan dalam bentuk kartu (seperti kartu kredit, debit, atau kartu nilai tersimpan (Julio & Theresia, 2024). Metode penyelesaian non-fisik mencakup berbagai alat, seperti penggunaan instrumen kredit, rekening dompet digital berbasis seluler, atau transfer dana langsung yang dilakukan melalui aplikasi keuangan khusus, yang sepenuhnya meniadakan kebutuhan akan mata uang fisik. Sebagaimana diakui dalam studi kontemporer, efisiensi ini krusial bagi kemajuan UMKM (Listiyono et al., 2024).

Mendorong ekspansi ekonomi digital yang pesat sangat bergantung pada satu langkah penting: keterlibatan aktif Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengintegrasikan solusi pembayaran digital yang terstandarisasi, khususnya penerapan Kode Respons Cepat Standar Indonesia (QRIS). Bagi entitas bisnis krusial ini, efisiensi yang lebih baik yang ditawarkan oleh transisi ke transaksi non-tunai tidak hanya menguntungkan tetapi juga fundamental. Pergeseran operasional ini memberikan daya ungkit yang sangat besar untuk mempercepat lintasan pertumbuhan mereka dan memastikan keberlanjutan bisnis. Dengan sepenuhnya mengadopsi infrastruktur nir-tunai, UMKM diberdayakan untuk merevolusi alur kerja keuangan internal mereka, yang menghasilkan penanganan transaksi yang optimal. Optimalisasi ini secara langsung berkontribusi pada sirkulasi modal yang cepat (peningkatan likuiditas) dan peningkatan produktivitas operasional secara keseluruhan yang terukur. Proyek penelitian kami yang sedang berlangsung didedikasikan untuk merekayasa ekosistem pembayaran yang sangat efisien dan aman. Hal ini melibatkan pengembangan aplikasi pembayaran seluler yang menampilkan peningkatan keamanan mutakhir dan integrasi lintas platform yang kuat, mencakup berbagai bentuk penyelesaian elektronik, terutama kerangka kerja QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang serbaguna.

LANDASAN TEORI

Standar Kode Respons Cepat Indonesia (QRIS) adalah sebuah mekanisme transaksi nirsentuh yang menggunakan teknologi kode QR. Platform ini diciptakan oleh Bank Sentral

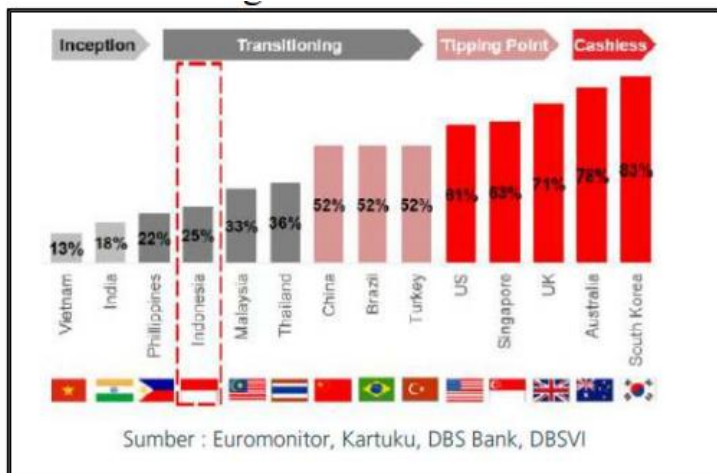


Indonesia (Bank Indonesia) dengan tujuan utama mewadahi seluruh penyedia layanan pembayaran digital domestik di bawah satu kerangka kerja regulasi dan teknis yang terpadu. Meskipun sistem pembayaran ini pertama kali diperkenalkan kepada publik pada Hari Kemerdekaan, 17 Agustus 2019, pelaksanaan dan kewajiban penggunaannya secara efektif baru diberlakukan secara nasional sejak 1 Januari 2020 (Aulia Salzabilla, 2021). Pengembangan QRIS merupakan buah dari kerja sama strategis antara Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Dalam pembangunannya, sistem ini mengadopsi standar teknis internasional EMV Co.1 (Aksenta et al, 2023). Penggunaan standar global ini krusial untuk menjamin kompatibilitas yang luas serta mendukung perluasan koneksi antarinstrumen pembayaran. Misi yang diemban oleh QRIS adalah menyederhanakan pengalaman pembayaran digital bagi masyarakat luas. Selain itu, platform ini juga memungkinkan regulator untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas transaksi digital melalui satu pintu (Endaryati, 2023).

Standarisasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia menetapkan empat pilar fundamental sebagai komponen inti QRIS. Menurut kajian Ningsih, Sasmita, & Sari (2021), keempat pilar tersebut meliputi:

1. Interoperabilitas (kemampuan saling operasi)
2. Interkonektivitas (kemampuan saling terhubung)
3. Security (keamanan), dan
4. Inklusi (perluasan akses).

Inovasi teknologi terus mengubah perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan esensial. Di era digitalisasi Industri 4.0, operasional bisnis pun turut bertransformasi (Gufran, 2023). Berbagai bisnis secara aktif meningkatkan produk mereka untuk memperluas jangkauan pasar dan mengamankan loyalitas pelanggan. Perangkat keuangan digital dan metode transaksi, yang dikenal luas sebagai non-tunai, merupakan contoh utama produk yang dikembangkan untuk melayani pelanggan dengan lebih mudah (Mahyuni et al., 2021). Perjalanan transaksi non-tunai di Indonesia dimulai dengan persiapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Bank Indonesia meluncurkan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) pada tahun 2014, yang bertujuan untuk mendorong adopsi transaksi non-tunai secara luas di kalangan pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat, dengan mengutamakan kemudahan, keamanan, dan kepraktisan. Meskipun demikian, data dari tahun 2014 hingga 2019 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia masih dalam proses menjadi mahir digital (Yola Afifa & Yarham, 2023).



Gambar 1. Perbandingan Transaksi Uang Elektronik Terhadap Total Transaksi

Data transaksi terkini menunjukkan disparitas yang signifikan dalam cara masyarakat Indonesia mengelola pembayaran. Sebanyak tiga perempat (75%) konsumen masih mengandalkan transaksi tunai manual, sementara hanya seperempat (25%) dari total masyarakat yang bertransaksi menggunakan metode modern non-tunai (Bank Indonesia, 2024). Preferensi yang tinggi terhadap pembayaran tradisional ini menunjukkan bahwa literasi keuangan fundamental belum merata di kalangan mayoritas masyarakat Indonesia. Meskipun tingkat adopsi secara keseluruhan rendah, sektor non-tunai mengalami pertumbuhan yang tajam. Pada tahun 2018, segmen minoritas yang menggunakan pembayaran digital menghasilkan 47,2 triliun transaksi, dengan jumlah uang beredar mencapai 167,2 juta unit. Akselerasi ini berlanjut hingga tahun berikutnya; Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa volume uang beredar melonjak menjadi 260 juta pada tahun 2019, menandai peningkatan yang signifikan sebesar 65% dari tahun ke tahun. Angka-angka spesifik ini diperkuat oleh data yang disajikan oleh CNN Indonesia (Abdus Salam, 2018).

Paskanova dan Engko (2024) menyebutkan landasan ilmiah untuk analisis ini menggabungkan beberapa konsep yang telah mapan. Perkembangan perilaku komersial dibingkai oleh prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Louis E. Boone (2007). Konteks transformasi digital berasal dari model Industri 4.0, sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Schlechtendahl (2015). Definisi yang berkaitan dengan metode transaksi nir-tunai dan nir-kartu diadopsi dari dokumentasi resmi yang disediakan oleh Bank for International Settlement (1996) dan Bank Indonesia (2009). Secara empiris, subjek sistem nir-tunai telah diteliti secara ekstensif, sebagaimana terlihat dalam karya-karya Abdullahi dkk. (2015); Salman & Saleem (2017); Trinugroho dkk. (2017); Marliah (2016); Tee & Ong (2016); dan Sumbawa & Widhiasthini (2018). Lebih lanjut, studi spesifik tentang transaksi nir-kartu didukung oleh penelitian seperti Iyabode et al (2015).

QRIS diciptakan untuk mempermudah dan memperluas jangkauan masyarakat dalam melakukan pembayaran digital (Bank Indonesia, 2019). Inisiatif yang digagas oleh Bank Indonesia memungkinkan beragam penyedia layanan pembayaran untuk beroperasi menggunakan satu kode QR tunggal (Permadi, 2021). Hal ini memberikan kemudahan yang signifikan, baik bagi konsumen maupun pelaku bisnis. Lebih lanjut, QRIS berperan penting dalam mendorong percepatan inklusi keuangan dan transformasi ekonomi digital, terutama



bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (Atmaja et al., 2022). Sebagai upaya penyederhanaan dan perluasan akses transaksi pembayaran digital, QRIS hadir untuk publik (Bank Indonesia, 2019). Bank Indonesia (2019) menjelaskan bahwa QRIS memfasilitasi keseragaman kode QR lintas berbagai penyedia jasa pembayaran, menawarkan kepraktisan bagi pengguna dan pelaku usaha. Tujuan utama QRIS adalah untuk mengakselerasi inklusi keuangan dan digitalisasi kegiatan ekonomi, dengan penekanan khusus pada UMKM (Atmaja et al., 2022).

METODE

Penelitian yang dilakukan dalam Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PPKM) ini mengadopsi pendekatan deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menguraikan berbagai dimensi dari suatu populasi atau fenomena yang sedang diamati, serta menyajikan penelaahan yang holistik mengenai objek studi. Singkatnya, pendekatan ini memungkinkan identifikasi mendalam mengenai proses dan faktor-faktor yang relevan dalam sebuah investigasi (Suharsimi, 2012).

Prasyarat mendasar bagi penelitian deskriptif adalah bahwa persoalan atau isu yang diajukan haruslah terukur dan dapat dijangkau. Hal ini penting karena pendekatan deskriptif bukanlah panacea yang cocok untuk segala jenis kajian, dan tidak dapat dipilih sembarangan oleh para peneliti. Dalam upaya mencapai akurasi observasi pada studi deskriptif, penetapan kerangka waktu (temporal scope) adalah sebuah keharusan. Justifikasi untuk penetapan ini adalah bahwa pengawasan terhadap suatu insiden atau fenomena, apabila dilakukan melintasi periode waktu yang terdefinisikan, cenderung menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan eksplisit. Pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan pemilik atau orang yang dipercaya mengelola usaha, dengan rincian sebagai berikut ;

Toko kelontong	berjumlah	5
Toko sembako	berjumlah	10
<u>Warung makan</u>	<u>berjumlah</u>	<u>10</u>
Total		25

Memastikan validitas pertanyaan riset merupakan langkah awal yang krusial. Tidak semua kategori topik sesuai untuk dianalisis melalui metodologi deskriptif, sehingga perumusan masalah penelitian harus mengandung bobot signifikansi keilmuan yang memadai (Sugiyono, 2019). Penentuan rentang waktu pelaksanaan penelitian berfungsi utama untuk mengoptimalkan kredibilitas serta konsistensi dari hasil riset. Oleh karena itu, peneliti harus memastikan bahwa proses pengumpulan data studi dilaksanakan secara tepat pada momen yang paling relevan (Creswell, 2015).

HASIL

Studi tentang perilaku bisnis mengkaji bagaimana organisasi komersial beroperasi untuk menghasilkan barang dan jasa yang memuaskan keinginan pasar, dengan harapan meraih profitabilitas dari setiap pertukaran. Dalam konteks ini, adopsi QRIS oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) paling banyak terlihat pada lini usaha seperti warung makan, kafe, gerai kebutuhan sehari-hari, dan beragam bentuk UMKM lainnya. Data menunjukkan bahwa para pedagang yang mengadopsi aplikasi QRIS memiliki jangkauan geografis yang luas dan telah mengalami evolusi peran dalam operasional bisnis mereka. Ringkasan informasi yang didapatkan dari informan atau nara sumber, sebagaimana disajikan berikut ;

Menggunakan QRIS awalnya dikira rumit karena kurang mengetahui dan memahami tentang fasilitas yang disediakan. Adajuga merasa ragu bahkan takut jika menggunakan QRIS bisa memberi dampak pada hal-hal yang negatif, seperti dana yang diproses tidak masuk, dana yang ada mudah dibobol atau kurang aman. Ada juga yang memang benar-benar tidak tahun dan tidak paham dengan QRIS sehingga awalnya tidak mau menggunakan fasilitas QRIS tersebut karena berbagai alasan.. (Informasi wawancara 5 Okt 2025).

Setelah menggunakan QRIS yang awalnya diduga rumit, sulit, bisa dibobol atau tidak aman maka setelah menggunakan fasilitas ini merasa lebih praktis proses pembayaran pada usaha yang ditekuni. Dengan fasilitas QRIS disebut lebih praktis, karena tidak perlu repot untuk mencari uang kembalian, kecewa jika karena biasanya pembeli membayar dengan uang yang kusam atau fisiknya jelek dengan QRIS tidak ada hal tersebut. Mengembalikan uang ke pembeli biasanya kurang atau juga terkadang lebih, maka dengan menggunakan QRIS hal ini bisa diantisipasi dengan maksimal. Biasanya ada rasa kurang percaya dengan orang yang menjaga toko atau warung karena bisa melakukan kecurangan, dengan QRIS maka rasa kurang percaya ini bisa diminimalisir. (Informasi wawancara 5 Okt 2025).

Dalam menghadapi percepatan kemajuan teknologi, banyak pelaku usaha kini mengintegrasikan teknologi finansial (fintech) sebagai komponen esensial dari strategi mereka. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan relevansi dan menjaga daya saing di tengah lanskap digital kontemporer. Fintech menyediakan beragam platform pembayaran digital, contohnya Gopay, Ovo, Dana, dan ShopeePay. Patut dicatat bahwa platform-platform ini mengimplementasikan teknologi QRIS untuk memfasilitasi transaksi, sebuah inovasi yang telah diuraikan oleh Setiawan & Mahyuni (2020).



Gambar 2. Pemanfaatan QRIS untuk Cashless



Daya tarik utama metode pembayaran QRIS ini terletak pada kesederhanaannya, memberikan pengalaman transaksi yang efisien dan cepat kepada konsumen, sekaligus menghilangkan ketidaknyamanan yang umum terjadi dalam menangani uang tunai dan uang kembalian. Lebih dari sekadar alat transaksi, teknologi finansial (tekfin) telah menjadi instrumen penting yang memungkinkan bisnis menjalani transformasi digital, sehingga membuka peluang signifikan untuk ekspansi dan pertumbuhan berkelanjutan. Namun, terlepas dari potensi yang sangat besar ini, masih banyak Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang belum sepenuhnya memanfaatkan kemajuan teknologi ini. Misalnya, beberapa sektor bisnis menunjukkan adopsi yang terbatas. Penelitian yang berfokus pada pasar tradisional, seperti studi tentang persepsi vendor di Pasar Induk Tamin di Bandar Lampung mengenai QRIS, mengungkapkan tantangan utama. Tantangan-tantangan ini meliputi rendahnya pemahaman tentang teknologi ini, kebiasaan menggunakan uang tunai yang sudah mengakar, dan kurangnya kesadaran akan manfaat sistem pembayaran elektronik yang lebih luas. Faktor-faktor tersebut menyebabkan para vendor ini menganggap QRIS dan teknologi serupa hanya memiliki dampak atau nilai yang kecil atau bahkan tidak ada sama sekali dalam lingkungan operasional spesifik bisnis yang ditekuni.

Integrasi transaksi non-tunai, terutama melalui platform seperti QRIS, memang membawa manfaat signifikan dan peningkatan kenyamanan. Namun, penting untuk menyikapi adopsi yang meluas ini dengan pertimbangan yang cermat, menerapkan strategi untuk memitigasi potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari praktik keuangan yang terus berkembang ini. Keunggulan utama sistem pembayaran non-tunai dan non-kartu terletak pada kemampuan pencatatannya yang kuat. Setiap transaksi didokumentasikan dengan cermat, memberikan pengguna wawasan terperinci untuk melacak secara akurat dan mengelola pengeluaran mereka secara efektif. Lebih dari itu, sistem ini menyediakan lapisan keamanan yang unggul. Jika terjadi kehilangan atau pencurian uang elektronik, dana biasanya dapat segera diblokir atau dibekukan, sehingga memastikan keamanan aset digital seseorang. Hal ini sangat berbeda dengan mata uang fisik, yang hanya menawarkan sedikit atau bahkan tidak ada jalan keluar untuk pemulihan setelah hilang.

KESIMPULAN

Penerapan QRIS (Quick Response Code Standar Indonesia) secara luas sangat penting bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Urgensi ini bermula dari definisi UMKM sebagai usaha produktif, baik yang dimiliki oleh perorangan maupun badan hukum, yang beroperasi dengan parameter pendapatan tertentu sebagaimana digariskan oleh peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. Sebagai pemasok barang dan jasa yang krusial, perusahaan-perusahaan ini tersebar secara geografis, tersebar di pusat kota maupun daerah pedesaan terpencil. Di luar distribusinya yang luas, UMKM memiliki pengaruh yang signifikan dan adaptif dalam perekonomian nasional. QRIS, dalam konteks ini, menawarkan alternatif yang optimal dan lebih efisien untuk memproses pembayaran non-tunai. Mengingat efektivitasnya yang telah terbukti dalam menyederhanakan transaksi non-tunai, integrasi QRIS oleh UMKM diposisikan secara strategis untuk meningkatkan kinerja operasional mereka secara signifikan, terutama di era digital yang berkembang pesat saat ini.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Abdus Salam. (2018). Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi dan Tantangan. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 10(1), 63–80. <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2813>.
- [2] Aksenta, Almasari, Irmawati Irmawati, Achmad Ridwan, Nur Hayati, Sepriano Sepriano, Herlinah Herlinah, & Ayupitha Tiara Silalah. (2023). *Literasi Digital : Pengetahuan & Transformasi Terkini Teknologi Digital Era Industri 4.0 dan Society 5.0*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- [3] Atmaja, Y. S., & Paulus, D. H. (2022). Partisipasi Bank Indonesia Dalam Pengaturan Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 271–286. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.271-286>.
- [4] Arikunto, Suharsimi. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- [5] Aulia Salzabilla Ramadhan Rahman, Syarwani Canon, Mahdalena Mahdalena. (2021). Optimalisasi Penerapan Sistem Pembayaran Digital Melalui QRIS Pada UMKM Kota Gorontalo. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/view/4732>.
- [6] Bank Indonesia. (2019). Sistem Pembayaran Uang Elektronik. <https://www.bi.go.id/id/statistik/sistempembayaran/uangelektronik/contents/jumlah%20uang%20elektronik.aspx>.
- [7] Creswell, John. W. (2015). *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Third Edition. SAGE Publications India Pvt. Ltd.
- [8] Echdar, Saban. (2017). *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis*. Cet.1. Bogor: Ghalia Indonesia.
- [9] Elma, Ramadanti Ruslaini, & Abidzar. (2023). Persepsi Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Penggunaan Sistem Pembayaran QRIS (Studi Kasus: Pasar Induk Tamin, Kota Bandar Lampung). *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(7), 3330–3337. <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v10i7.2023.3330-3337>.
- [10] Endaryati, Eni. (2023). *Manajemen Dan Pengolahan Transaksi Keuangan Usaha Kecil*. Jakarta, Indonesia. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.
- [11] Goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, A., & Perdana. (2018). Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Bank Indonesia: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- [12] Gufran, Muhammad Irsiad, Muhammad Natsir, & Tajuddin Tajuddin. (2023). Determinan Tingkat Penggunaan Quick Response Indonesian Standard Di Kota Kendari. *Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis* 19, no. 2 (October 26, 2023): 89–94. <https://doi.org/10.26714/vameb.v19i2.13274>.
- [13] Imran, Imran, Nasran Nasran, Kaharudding Nawing, and Roy Kuliyan. (2023). Pemahaman Young Citizen Terhadap Nilai Kearifan Lokal Desa Salumpaga Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli di Era Globalisasi. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(4), 19–26. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.4451>.
- [14] Julio. A, Tamen. N. Theresia. N. (2024). Analisis Persepsi Penggunaan Qris (Quick Response Indonesia Standard) Sebagai Alat Transaksi UMKM di Kota Bajawaj. *Journal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 9(3), 107–115.
- [15] Listiyono, Hersatoto, Eko Nur Wahyudi, and Dwi Agus Diartono. (2024). *Dinamika*



- Implementasi QRIS : Meninjau Peluang dan Tantangan Bagi UMKM Indonesia. *Ikraith-Informatika*, 8(2), 120-26. <https://doi.org/10.37817/ikraith-informatika.v8i2.2967>.
- [16] Mahyuni, Luh Putu, and I Wayan Arta Setiawan. (2021). Bagaimana QRIS Menarik Minat UMKM? Sebuah Model Untuk Memahami Intensi UMKM Menggunakan QRIS. *Forum Ekonomi* 23, no. 4 (2021): 735–47. <https://doi.org/10.30872/jfor.v23i4.10158>.
- [17] Paskanova. C, Engko. C. (2024). Sistem pembayaran QRIS sebagai upaya pengembangan UMKM di kota Ambon. *Journal of Business & Banking*, 13(02), <https://doi.org/10.14414/jbb.v13i2.3766>.
- [18] Permadi, Yudistira Andi, and Angestika Wilandari. (2021). Preferences of Using Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Among Students as a Means of Digital Payment. *Journal of Enterprise and Development*, 3(01), 1-12. <https://doi.org/10.37817/ikraith-informatika.v8i2.2967>.
- [19] Prasetyo, Donny, and Irwansyah. (2019). Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 1(1), 163–75. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i1.253>.
- [20] Rahman, Ahmad Fahri Syaifuddin Kurnia, & Supriyanto Supriyanto. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Minat Penggunaan Qris Sebagai Metode Pembayaran Pada Masa Pandemi. *Indonesian Scientific Journal of Islamic Finance*, 1(1), 1–21. <https://doi.org/10.21093/inasjif.v1i1.4739>.
- [21] Puspitaningrum. Fitri, Cintya. Sophie, & Rimbawati Anik. (2023). Penggunaan QRIS Dalam Transaksi Jual Beli di Tengah Masyarakat UMKM Ketintang Surabaya. *Jurnal Ilmu Sosial*, 603-614.
- [22] Subar, Katherine. (2021). “Optimalisasi Penerapan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Pada Merchant Di Wilayah Surakarta. *Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran*, 5(2), 43–57.
- [23] Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- [24] Situmorang, M. K. (2021). Pengaruh Perilaku Konsumen Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (Dompot Digital) Sebagai alat Pembayaran pada Masa Pandemi Covid – 19 di Kota Medan. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 4(1), 123–130. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/MANEGGIO/article/view/6646>
- [25] Siti Aisyah, Putri Sepfiani, Lestari Perdana Putri, Danish Irsyad Gunawan, Habib Lauda Nararya. (2023). Pendampingan Penggunaan Qris Pada UMKM Upaya Peningkatan Produktivitas UMKM Di Kota Medan. *Journal of International Multidisciplinary*, 2(50), 554-564. <https://doi.org/10.55606/nusantara.v3i1.614>.
- [26] Triagita, A., Apriani, N., Yudanto, D. W., & Lutfiah, Z. N. (2024). Analisis Dampak Penggunaan Transaksi Non Tunai (Cashless) Terhadap Pertumbuhan UMKM. *Jurnal Prosiding SEMANIS: Seminar Nasional Manajemen Bisnis*, 2(1), 826-885.
- [27] Yola Afifa & M. Yarham. (2023). Dampak Penggunaan QRIS pada Pelaku UMKM di Kota Padangsidimpuan (Studi Kasus pada Coffee Shop Kopi Koe) <https://pdfs.semanticscholar.org/6be7/1e1bead2251e08c1760237c0b983ab531ac6.pdf>.
- [28] Yuniarti. A. (2023). Pemberdayaan UMKM tentang Pentingnya Adaptasi Digital dan Legalitas Usaha di Limpomajang Kec. Majauleng Kab. Wajo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset*, 2(1). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i1.177>.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN